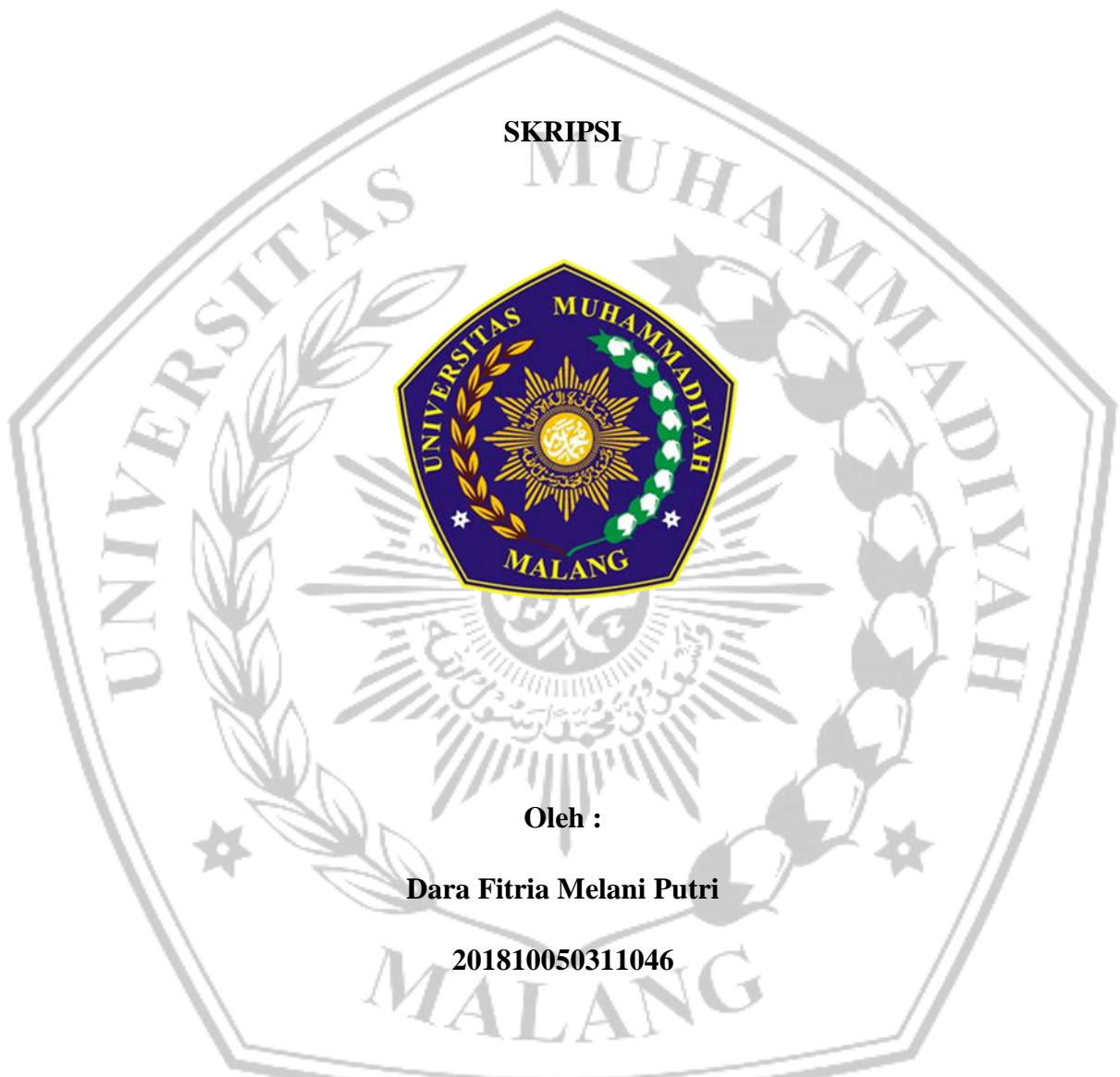


**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAH DESA**

**(Studi di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau
Provinsi Kalimantan Tengah)**

SKRIPSI



Oleh :

Dara Fitria Melani Putri

201810050311046

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAH DESA

(Studi Di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi
Kalimantan Tengah)

Diajukan Oleh :

DARA FITRIA MELANI PUTRI

201810050311046

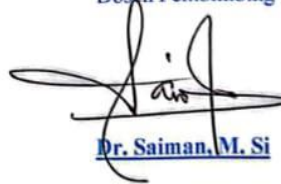
Telah disetujui

Pada hari / tanggal, *Selasa* 25 Juli 2023

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan


Muhammad Kamil, S. IP., M. A

Dosen Pembimbing


Dr. Saiman, M. Si

Mengetahui



Najamuddin Khairi, S. IP., M. Hub. Int.

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

DARA FITRIA MELANI PUTRI

201810050311046

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan

L U L U S

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana (SI) Ilmu Pemerintahan

Pada hari Senin 17 Juli 2023

Dihadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. **Drs. Krishno Hadi, M. A.**
2. **Muhammad Kamil, S. IP., M. A**
3. **Dr. Saiman, M. Si.**



Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Najamuddin, S. IP., M. Hub. Int.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS / KEASILAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial * Ilmu Pemerintahan * Ilmu Komunikasi * Sosiologi * Hubungan Internasional
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144 Pes. 132

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dara Fitria Melani Putri
NIM : 201810050311046
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah) adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Juli 2023
Yang Menyatakan,



Dara Fitria Melani Putri

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur saya haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Segala, atas percikan kasih, rahmat, hidayah serta taufiq-Nya sehingga Tugas Akhir saya yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah)” ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Banyak pihak yang telah memberikan bantuan dukungan serta do'a penuh cinta kepada saya dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan beribu terima kasih atas bantuan yang tak ternilai kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M. Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah menyediakan fasilitas kampus serta berbagai media belajar yang memadai.
2. Bapak Prof. Dr. Muslimin Machmud, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan perencanaan dalam tugas akhir ini.
3. Bapak Muhammad Kamil, S. IP., M.A Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menyetujui perencanaan penulis dalam tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. Saiman, M. Si. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir maupun kesediannya dalam membimbing di masa penyusunan Tugas Akhir.

5. Segenap jajaran Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang tak terhingga untuk penulis.
6. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Sugeng dan Ibu Asmiati yang selalu yang selalu mendukung, mendoakan, serta memberikan semangat selama proses kuliah maupun kesibukan di luar bangku perkuliahan.
7. Saudara dan kerabat penulis: Adelia Devi dan Muhammad Gading Habibie, serta segenap keluarga besar penulis yang telah memotivasi langkah demi langkah perjalanan hidup selama ini.
8. Teman dan sahabat penulis : Tri Maharani, Sekar Ayu, Siska Dwiki, Wilan Melia, Yasinta Aulia, Sayyidah Nurrahmah, Nadia Wulandari, Husna, Alliya Safitri, dkk yang selalu menjadi rumah bagi saya untuk berbagi kisah dan keluh kesah selama berada di tanah perantauan.
9. Kepada diri penulis sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai pada titik ini.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS / KEASILAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR BAGAN	x
ABSTRAK.....	xi
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Manfaat dan Tujuan	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Definisi Konseptual.....	7
1. Konsep Pengawasan.....	7
2. Pemerintahan Desa.....	8
3. Badan Permusyawaratan Desa	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Subjek Penelitian Data	10
5. Lokasi Penelitian	11
6. Teknik Analisis Data	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Konsep/ Teori.....	15
1. Konsep Pengawasan	15

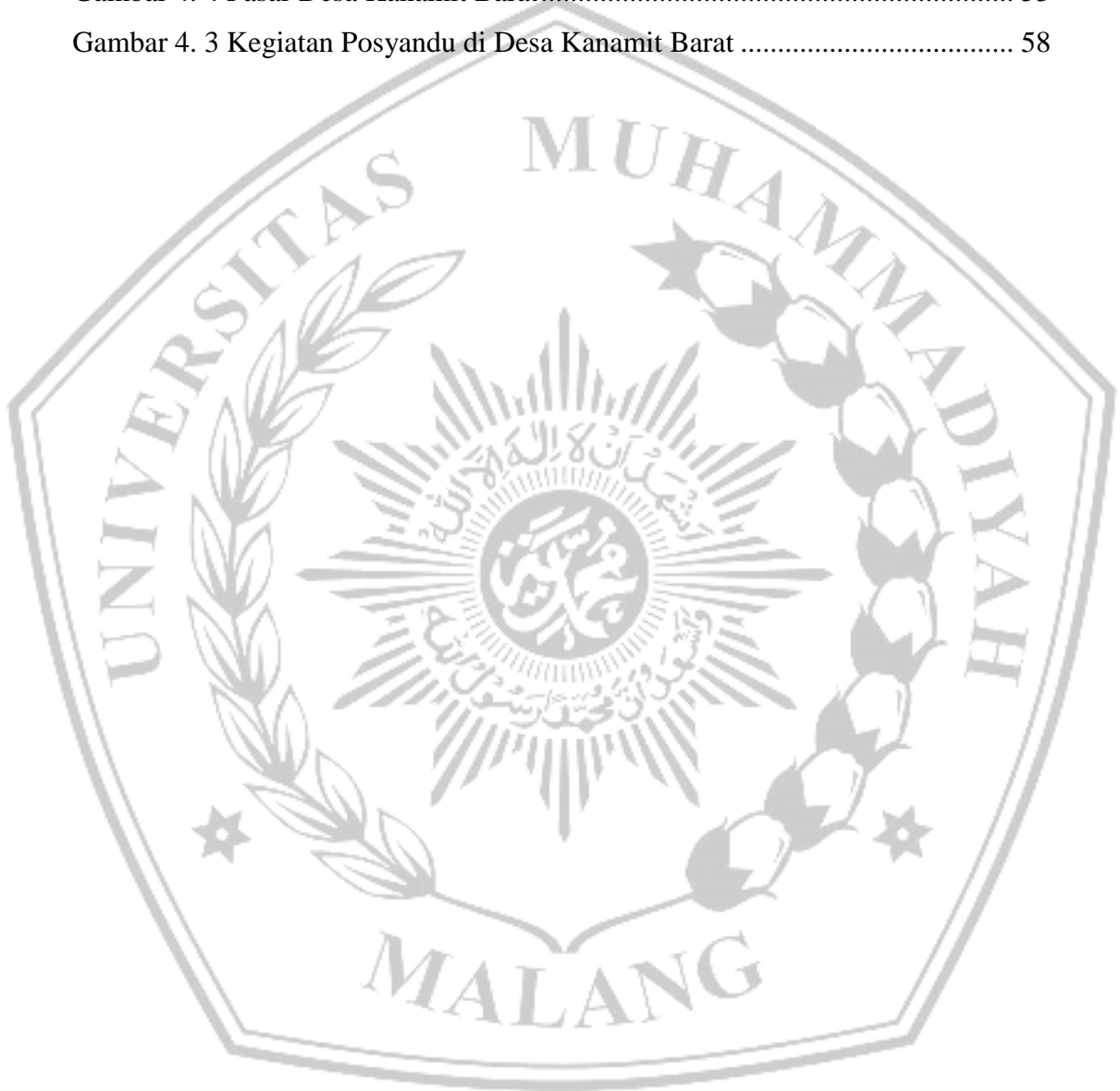
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	20
BAB III	24
DESKRIPSI WILAYAH	24
A. Gambaran Umum Desa Kanamit Barat.....	24
1. Kondisi Geografis Desa.....	25
2. Kondisi Geografis Desa.....	26
a. Desa/ Kelurahan di Kecamatan Maluku.....	26
B. Pemerintahan Desa Kanamit Barat	27
1. Tugas Pokok dan Fungsi	28
2. Pogram Kegiatan Desa Kanamit Barat.....	31
3. Visi dan Misi Pemerintah Desa Kanamit Barat.....	32
4. Struktur organisasi.....	33
BAB IV	34
PEMBAHASAN	34
A. Perencanaan dan Penyusunan Program Kerja Desa Kanamit Barat Tahun 2022	34
1. Bidang Pembangunan Desa	42
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	44
3. Bidang Administrasi	45
4. Bidang Kesehatan.....	46
B. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	47
1. Pengawasan Langsung	47
2. Pengawasan Tidak Langsung	59
BAB V.....	70
KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wiayah Desa di Kecamatan Maluku.....	26
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk	26
Tabel 3.3 Penduduk menurut Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 3.4 Penduduk menurut Mata Pencaharian.....	27
Tabel 3.5 Penduduk menurut Usia	27
Tabel 3.6 Keanggotaan BPD Kanamit Barat Masa Jabatan Tahun	31
Tabel 3.7 Program Kegiatan Desa Kanamit Barat Tahun 2022.....	31
Tabel 4.1 Daftar Hadir Pelaksanaan Forum “Serap Aspirasi” Desa Kanamit Barat Tahun 2021	36
Tabel 4.2 Kesimpulan Hasil Kegiatan Serap Aspirasi Tahun 2021.....	37
Tabel 4. 3 Program Kerja Desa Kanamit Barat Tahun 2022	38
Tabel 4. 4 Pelaksanaan Kegiatan BPD Kanamit Barat Tahun 2022.....	50
Tabel 4. 5 RKPDes Kanamit Barat Tahun 2022.....	54
Tabel 4. 6 Rincian Realisasi Pendapatan Selama 1 tahun Desa Kanamit Barat ...	64
Tabel 4. 7 Target dan Realisasi Dana Desa Kanamit Barat Tahun 2022.....	65
Tabel 4. 8 Daftar Pembangunan Desa yang Telah Dilaksanakan pada Tahun 2022	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Kanamit Barat.....	25
Gambar 4.1 Forum Serap Aspirasi Masyarakat Desa Kanamit Barat.....	37
Gambar 4. 2 Musyawarah Desa Kanamit Barat.....	40
Gambar 4. 4 Pasar Desa Kanamit Barat.....	53
Gambar 4. 3 Kegiatan Posyandu di Desa Kanamit Barat	58



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi 33



ABSTRAK

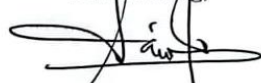
Dara Fitria Melani Putri, 201810050311046, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah), Dosen Pembimbing : Dr. Saiman, M. Si.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan BPD memiliki fungsi yaitu melakukan pengawasan pada Pemerintahan Desa. Pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan suatu kegiatan organisasi untuk dapat menjamin keseluruhan pekerjaan yang tengah dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan pada pemerintahan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kanamit Barat tentunya dilakukan untuk mencegah serta memperbaiki kesalahan, penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dikerjakan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan BPD meliputi pengawasan langsung di lapangan dan tidak langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsep pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, dokumentasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Badan Permusyawaratan Desa Kanamit Barat melaksanakan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah guna mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Pemerintah Desa. Hasil penelitian yang dilakukan memiliki tiga poin utama yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat Desa Kanamit Barat meliputi empat bidang yaitu Pembangunan, pemberdayaan, administrasi dan Kesehatan yang kesemuanya berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga program kerja yang ada memang benar-benar diperuntukan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya pengawasan oleh BPD desa Kanamit dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung pada bidang Pembangunan, pemberdayaan, administrasi dan Kesehatan pihak BPD ikut hadir dalam rencana penetapan anggaran dan lainnya yang dilakukan oleh pihak desa, namun untuk inspeksi secara langsung jarang dilakukan oleh pihak BPD mengingat kesibukan yang ada serta fungsi pokok BPD yang hanya sebagai monitoring saja. Selanjutnya pengawasan secara tidak langsung dilakukan pula terhadap empat bidang yaitu Pembangunan, pemberdayaan, administrasi dan Kesehatan dimana pengawasan dilakukan dengan membandingkan pencapaian yang ada dalam laporan pertanggungjawaban desa dengan rencana awal yang telah dibuat. Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka saran yang dapat diberikan adalah agar BPD dapat melakukan inspeksi langsung sesekali sebagai bentuk pengawasan, serta menetapkan mekanisme pengawasan yang jelas.

Kata kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, Pengawasan*

Malang, 19 September 2023

Mengetahui,
Pembimbing,


Dr. Saiman M. Si.

Penulis,


Dara Fitria Melani Putri

ABSTRACT

Dara Fitri Melani Putri, 201810050311046, University of Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Science, Majoring in Governmental Science, Implementation of Supervision by The Village Consultative Body (BPD) on the Implementation of Village Government (Study in Kanamit Barat Village Maluku District Pulang Pisau Regency Central Kalimantan Province), Thesis Advisor : Dr. Saiman, M. Si.

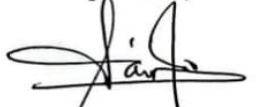
The Village Consultative Body (BPD) is an institution that carries out government functions and the BPD has the function of supervising the Village Government. Supervision is the process of observing the implementation of an organizational activity to ensure that all work being carried out runs according to a predetermined plan. Supervision carried out on the village government is carried out by the West Kanamit Village Consultative Body of course to prevent and correct errors, deviations and discrepancies in the implementation of the tasks carried out and the implementation is carried out in accordance with previously agreed plans. Supervision carried out by BPD includes direct supervision in the field and indirect. This research uses descriptive research methods and uses a qualitative approach. The concept used in this research is the concept of supervision. The method used in this research uses qualitative methods with literature studies, documentation and interviews. The aim of this research is to find out how the West Kanamit Village Consultative Body carries out its supervisory function in the implementation of village government in West Kanamit Village, Maluku District, Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan Province in order to prevent abuse of power by the Village Government. The results of the research carried out have three main points, namely the administration of government by West Kanamit Village officials covering four areas, namely Development, Empowerment, Administration and Health, all of which run in accordance with community aspirations so that existing work programs are truly intended for the benefit of the community. Furthermore, supervision by the Kanamit village BPD is carried out in two ways, namely directly and indirectly. Directly in the areas of development, empowerment, administration and health, the BPD is present in the budget and other planning plans carried out by the village, but direct inspections are rarely carried out by the BPD considering the busy schedule and the main function of the BPD which is only monitoring. Furthermore, indirect supervision is also carried out in four areas, namely Development, Empowerment, Administration and Health, where supervision is carried out by comparing the achievements in the village accountability report with the initial plans that have been made. Based on the results of existing research, the suggestion that can be given is that the BPD can carry out direct inspections occasionally as a form of supervision, as well as establishing a clear monitoring mechanism.

Keywords: Village Consultative Board, Village Government, Supervision

Malang, 19 September 2023

Acknowledgement,

Supervisor,



Dr. Saiman, M. Si.

Researcher,



Dara Fitri Melani Putri

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI



LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:

Nama : Dara Fitria Melani Putri
NIM : 201810050311046
Judul TA/Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa
Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten
Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah)

Pembimbing I : Dr. Saiman, M. Si.

Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
1	92	72	12	2	3

Administrator,

Ali Roziqin, M. PA

Malang, 21 September 2023
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan



Muhammad Kamil, S.IP., MA

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, U. D. (2016). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. *Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, 5.
- Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan pembangunan desa di desa bagan limau kecamatan ukui kabupaten pelalawan. *VALUTA*, 2(2), 251-267.
- Amanda, H. W. (2015). Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (Bpam) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). *Publika*, 3(5).
- Badan Restorasi Gambut. (2018). *Profil Desa Peduli Gambut Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah*.
- BPD Kanamit Barat. (2021).
- BPS Kabupaten Pulang Pisau. (n.d.). Retrieved December 26, 2021, from <https://pulpiskab.bps.go.id/indicator/153/142/1/luas-wilayah-maliku.html>
- BPS Kabupaten Pulang Pisau. (2018). <https://pulpiskab.bps.go.id/indicator/153/142/1/luas-wilayah-maliku.html>
- Dewi, I., Sumarni, T., & Indra, I. (2020). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAHAN DESA Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 118. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.508>
- Fadhil, R. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pada Desa Barusjulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo)*.
- Hafifah, N., & Abidin, Z. (2020). Peran posyandu dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Desa Sukawening, Kabupaten Bogor. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 2(5), 893-900.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Islamiah, Piersandreas Noak, I. K. W. (2016). "Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Di Kabupaten Badung." *Citizen Charter*, 1(1), 5. <https://ojs.unud.ac.id/Index.Php/Citizen/Article/View/23495>
- Jasmen, T. A. (2021). *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana*.
- Jawawi, M. (2022). *Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan*

Desa terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus di Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri).

laporan kinerja BPD (Badan Permusyawaratan Desa). (2022).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022. (2022).

Lembong, F., Lopian, M. T., & Kalangie, F. (2017). Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Governance*, 5(1), 1–18.

Mukri, A. Al, & Waluyati, S. A. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Seri Kembang Ii *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 13–23. <https://core.ac.uk/download/pdf/267824668.pdf>

Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214-239.

Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4(2), 161-174. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/454/885>.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh BPD » PALIRA. (n.d.). Retrieved July 18, 2023, from <https://pusbimtecpalira.com/pengawasan-penyelenggaraan-pemerintahan-oleh-bpd/>

Pradita, M. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Desa Kuang dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur Organ Ilir Sumatera Selatan (Issue April).*

Purwadi. (2018). Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda. *Akuntabel*, 14(2), 187. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1911>

Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2019). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(2), 136-149.

Putra, M. E., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 109-122. <file:///C:/Users/winx/Downloads/2009-Article%20Text-6902-2-10-20200518.pdf>

Rahman, A., & Achmad, D. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Kemajuan Pariwisata Kab. Dompu. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*

Masyarakat Bidang Pariwisata, 1(1), 39-47.

Ramlan, & Sihombing, E. N. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa* (E. Asmadi (Ed.)). Enam Media.

Reza, M. F. (2018). *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Nampurejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo Menurut Perda No.3 Tahun 2006* (Issue July).

Rusdia, U. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 139-153.

Safelia, N., Putra, W. E., & Setiawan, D. (2015). IbM pada koperasi di kota jambi dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan koperasi dengan pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 30(3).

Sandewa, F. (2017). Pengawasan Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut (Studi Tentang Pengawasan Camat Terhadap Kinerja Aparatur Di Kecamatan Banggai). *E Jurnal Katalogis*, 5(4), 150–159. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/8964>

Serpiner. (2016). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desasempyang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 4(2), 192–206.

Suliswati, D., & Razi, F. (2020). Kebijakan Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Dalam Rekonstruksi Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 348. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28977>

Sunarti, N. (2018). Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. *DINAMIKA : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 46–55.

Tengkeng, H., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan*. 1(1).

Tim Pemetaan Sosial Desa Kanamit Barat. (2018). *PROFIL DESA KANAMIT BARAT*.

Tinov, M. Y. T., & Andrean, N. (2016). *Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2014*. 3(1), 1–14. <https://media.neliti.com/media/publications/32932-ID-pengawasan-pemilihan-umum-legislatif-di-kecamatan-marpoyan-damai-kota-pekanbaru.pdf>

Undang-undang Republik Indonesia. (2016). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 1, 45–54.

<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

Usman. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.

Wijayanto, D. E. (2017). Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40-50. file:///C:/Users/winx/Downloads/17-33-1-SM.pdf.

Yoga Teja Wiguna, R. D. & N. A. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Planning Village. *Perspektif*, 6(2), 41–52.

Zubaidah, & Kustiawan. (2017). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun 2014. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 118–152.

